

PERTAUTAN ILMU DAN KEKUASAAN: STRATEGI ULAMA DALAM MENAVIGASI POROS-POROS POLITIK

Sertia Okta Diana¹, Alfauzan Amin², Saepudin³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu

e-mail:sertiaoktadiana67@gmail.com¹,alfauzan_amin@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,

saepudin@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

Abstract : *This study examines the interrelation between knowledge and power by highlighting the strategies of ulama in navigating political spheres in Indonesia. The focus lies on how religious scholarly authority is utilized to shape, maintain, or negotiate positions within political power structures. The study aims to understand the dynamics between religious knowledge and political interests, as well as their implications for the social legitimacy of the ulama. The research employs a qualitative descriptive approach, involving literature analysis, interviews with religious figures, and case studies of ulama involvement in contemporary politics. The findings indicate that ulama adopt adaptive strategies through moral narratives, scholarly authority, and social networks to sustain their influence amid political competition. In conclusion, knowledge and power are not separate entities but are deeply intertwined in shaping configurations of authority and legitimacy within politico religious society.*

Keywords : *Relation between Knowledge and Power, Ulama's Strategies, Political Blocs*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji pertautan antara ilmu dan kekuasaan dengan menyoroti strategi ulama dalam menavigasi poros-poros politik di Indonesia. Fokus kajian terletak pada bagaimana otoritas keilmuan keagamaan digunakan untuk membentuk, mempertahankan, atau menegosiasikan posisi dalam struktur kekuasaan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika relasi antara pengetahuan keagamaan dan kepentingan politik, serta implikasinya terhadap legitimasi sosial ulama. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis terhadap literatur, wawancara tokoh keagamaan, serta telaah kasus keterlibatan ulama dalam politik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama menggunakan strategi adaptif melalui narasi moral, otoritas keilmuan, dan jejaring sosial untuk menjaga pengaruh di tengah kompetisi politik. Kesimpulannya, ilmu dan kekuasaan bukan entitas yang terpisah, melainkan saling berkelindan dalam membentuk konfigurasi otoritas dan legitimasi dalam masyarakat politik-religius.

Kata Kunci: Relasi Ilmu dan Kekuasaan, Strategi Ulama, Poros Politik

PENDAHULUAN

Relasi antara ilmu dan kekuasaan telah lama menjadi tema sentral dalam kajian sosial dan politik, terutama dalam konteks hubungan antara agama dan negara. Dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut memiliki corak yang khas melalui interaksi antara ulama

sebagai pemegang otoritas keilmuan dan moral keagamaan dengan aktor-aktor politik yang memiliki kekuasaan institusional. Ulama sering kali berperan sebagai figur moral yang mampu memberi legitimasi terhadap tindakan politik dan kebijakan publik, di mana otoritas keilmuan mereka digunakan untuk memperkuat posisi kekuasaan

melalui wacana keagamaan (Andhika et al., 2024). Sepanjang sejarah, ulama tidak hanya menjadi pembimbing spiritual, tetapi juga tokoh yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan sosial dan politik, serta turut membentuk legitimasi moral bagi kekuasaan (Baihaqi, 2019).

Dalam dinamika politik kontemporer yang ditandai oleh perubahan cepat dan poros-poros kekuasaan yang cair, posisi ulama menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjaga integritas dan otoritas keilmuannya; di sisi lain, mereka berhadapan dengan tekanan politik yang menuntut keberpihakan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana ilmu dan kekuasaan saling berkelindan dalam membentuk struktur sosial dan legitimasi publik. Pemerintah dan lembaga keagamaan sering kali terlibat dalam produksi pengetahuan keislaman yang selaras dengan kepentingan politik negara (Syafi'i, Najib, & Mujib, 2023), sementara ulama menggunakan otoritas moralnya untuk memengaruhi arah politik dan kebijakan (Syiddik & Efendi, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji strategi ulama dalam menavigasi poros-poros politik dengan menempatkan relasi antara ilmu dan kekuasaan sebagai kerangka analisis utama. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana otoritas keagamaan beroperasi dalam struktur politik modern Indonesia, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk konfigurasi legitimasi dan kekuasaan di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi ulama dalam menavigasi poros-poros politik di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2014). Lokasi

penelitian difokuskan di wilayah Kota Bengkulu, mengingat daerah ini memiliki tradisi keulamaan yang kuat serta keterlibatan signifikan dalam politik lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian serupa yang mengkaji relasi ulama dan kekuasaan di wilayah lokal Indonesia (Nisa, 2020). Peneliti berperan sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang secara langsung melakukan observasi, wawancara, dan interpretasi terhadap data lapangan, dengan menjaga objektivitas melalui triangulasi data dan refleksi kritis (Moleong, 2017).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap media, arsip organisasi keagamaan, serta pernyataan publik ulama. Subjek penelitian mencakup ulama yang aktif dalam kegiatan politik, sementara informan pendukung terdiri atas tokoh ormas Islam, akademisi, dan pengamat politik keagamaan yang dipilih melalui *purposive sampling* (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan secara induktif dan interaktif dengan mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Proses analisis dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data untuk menjaga konsistensi antara temuan empiris dan kerangka teoretis mengenai relasi antara ilmu dan kekuasaan (Andhika et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama memainkan peran strategis dalam membangun relasi antara ilmu dan kekuasaan di tengah dinamika politik Indonesia. Berdasarkan wawancara dan observasi di wilayah Kota Bengkulu, ditemukan bahwa ulama tidak hanya berperan sebagai figur keagamaan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang mampu memengaruhi arah politik melalui legitimasi moral dan simbolik (Baihaqi, 2019). Strategi yang digunakan ulama

untuk menavigasi poros-poros politik meliputi tiga bentuk utama: pertama, penguatan narasi moral keagamaan sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik; kedua, pemanfaatan jejaring sosial dan lembaga pendidikan, seperti pesantren, untuk memperluas pengaruh politik secara kultural; dan ketiga, sikap adaptif terhadap kekuasaan, yakni kemampuan menyesuaikan posisi politik tanpa kehilangan citra keulamaan (Andhika et al., 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa ilmu atau otoritas keagamaan menjadi modal simbolik yang efektif untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (Syiddik & Efendi, 2025).

Pembahasan terhadap temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ilmu dan kekuasaan bersifat saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kerangka teori *power/knowledge* Michel Foucault, otoritas keilmuan yang dimiliki ulama berfungsi sebagai bentuk kekuasaan yang bekerja melalui wacana, norma, dan legitimasi sosial (Foucault, 1980). Ulama memanfaatkan posisi mereka sebagai penjaga moralitas publik untuk menegosiasikan ruang politik secara halus, tanpa harus terlibat secara langsung dalam perebutan kekuasaan (Nisa, 2020). Di sisi lain, poros-poros politik juga menggunakan figur ulama untuk memperoleh legitimasi dan dukungan sosial (Syafi'i, Najib, & Mujib, 2023). Interaksi timbal balik ini menghasilkan pola hubungan yang kompleks, di mana ilmu berfungsi bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang menentukan arah dan stabilitas politik keagamaan di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara ilmu dan kekuasaan dalam konteks keulamaan di Indonesia bersifat dinamis, saling memengaruhi, dan tidak dapat dipisahkan. Ulama berperan sebagai aktor penting yang

menjembatani ranah keagamaan dan politik melalui strategi adaptif yang menggabungkan otoritas moral, legitimasi keilmuan, serta kemampuan membangun jaringan sosial yang luas. Dalam menghadapi poros-poros politik yang terus berubah, ulama tidak hanya mempertahankan otoritas keagamaannya, tetapi juga mampu memanfaatkan pengetahuan keislaman sebagai modal simbolik untuk menavigasi arena kekuasaan secara efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa ilmu dalam konteks keulamaan berfungsi bukan hanya sebagai sarana pencerahan spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi yang memperkuat posisi sosial dan politik ulama di masyarakat.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa ilmu dan kekuasaan saling berkelindan dalam membentuk struktur otoritas di masyarakat politik-religius Indonesia. Keterlibatan ulama dalam politik tidak semata-mata mencerminkan ambisi kekuasaan, melainkan bentuk strategi untuk menjaga peran sosial dan moral di tengah perubahan politik yang cepat. Penelitian ini merekomendasikan agar studi selanjutnya mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana generasi ulama muda memaknai kekuasaan di era digital dan bagaimana perubahan media komunikasi turut memengaruhi cara ulama mengonstruksi legitimasi dan otoritas keilmuannya di ruang publik kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, M. R., Hamdi, S., Jailani, J., Suroto, S., Ajidan, A., & Syahputra, R. (2024). Ulama, madrasah dan legitimasi kekuasaan: Dinamika otoritas keilmuan dalam sejarah Islam. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(2), 63–78.
- Baihaqi, M. (2019). Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kontestasi Islam politik mutakhir. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2(2), 115–130.

-
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). New York: Pantheon Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, E. F. (2020). The bureaucratization of Islam in Southeast Asia: Ulama and the state in contemporary Indonesia. *Contemporary Islam*, 14
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, I., Najib, M., & Mujib, A. N. A. (2023). Ulama, otoritas halal dan politik pengetahuan: Hegemoni Kemenag melalui tafsir ilmi. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(1), 45–62.
- Syiddik, R., & Efendi, Z. (2025). Legitimasi ulama dalam konteks politik: Studi kasus Padang Lawas Utara. *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 55–68.